

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2021 membaik dari triwulan I tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari struktur PDRB (pada tabel 1). Perbaikan ekonomi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi oleh peningkatan net ekspor luar negeri yang semula 13 persen pada semester I tahun 2020 menjadi 15,93 persen pada periode yang sama tahun 2021, serta pengeluaran konsumsi pemerintah semula 4,88 persen pada semester I tahun 2020 menjadi 34,51 persen pada periode yang sama tahun 2021, seiring dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kegiatan perdagangan luar negeri, terutama ekspor merupakan salah satu sumber terbesar bagi penerimaan devisa. Gambaran perkembangan ekspor Sumatera Selatan di Kota Palembang pada bulan Februari 2021 (gambar 2) mengalami penurunan sebesar \$367,29 juta dibandingkan dengan bulan Januari 2021 yaitu \$393,98. Peningkatan konsumsi pemerintah pada triwulan III tahun 2020, akan berdampak terhadap kinerja investasi yang turut meningkat, walaupun kegiatan ekspansi usaha belum Kembali ke kondisi pra COVID-19. Ekspor Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi hingga bulan September 2020 mencapai US\$ 286,80 juta. Nilai ekspor ini turun sebesar 8,67 persen dibandingkan ekspor bulan Agustus 2020 dan 15,35 persen pada bulan periode sampai dengan September 2019. Namun demikian nilai ekspor pada bulan Februari 2021 adalah sebesar \$367,29 juta lebih tinggi daripada pada bulan Februari 2020, yaitu sebesar \$291,83 juta, begitupun pada nilai import bulan Februari 2021 sebesar \$53,01 juta yang juga lebih tinggi daripada bulan Februari 2020 sebesar \$36,33 juta. Hal ini menunjukkan terjadinya fluktuasi neraca perdagangan berupa peningkatan net ekspor dan import. Uraian Volume (ribu ton) Perubahan (%) Feb 2020 Jan-Feb 2020 Jan 2021 Feb 2021 Jan-Feb 2021 Februari 2021 terhadap Februari 2020 (y-on-y) Feb 2021 terhadap Januari 2021 (m-to-m) Jan-Feb 2021 terhadap Jan-Feb 2020 (c-to-c) Persentase total impor Jan-Feb 2021 Non Migas 92.77 190.83 74.69 88.02 162.71 -5.12 17.85 -14.73 95.13 Migas 0.49 8.89 1.52 6.81 8.33 1290.25 348.43 -6.27 4.87 - Minyak Mentah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Hasil Minyak 0.49 8.89 1.52 6.81 8.33 1290.25 348.43 -6.27 4.87 - Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Impor 93.26 199.72 76.21 94.84 171.04 1.69 24.44 -14.36 1000 Dari sisi volume (tabel 1), import Sumatera Selatan pada bulan Februari 2021 meningkat 24,44 persen dibandingkan Januari 2021, yang disebabkan oleh peningkatan volume import nonmigas sebesar 13,33 ribu ton (17,85 persen) dan migas sebesar 5,29 ribu ton (348,43 persen). Apabila dibandingkan dengan bulan Februari 2020, volume import total meningkat 1,57 ribu ton (1,69 persen), yang berasal dari kenaikan import non migas sebesar 1.290,25 persen, namun juga disertai dengan penurunan import migas sebesar 5,12 persen. Dengan demikian peningkatan import nonmigas sebesar 95,13 persen telah membuat terjadinya perubahan total import triwulan I tahun 2021. Walaupun nilai import nonmigas berdasarkan komoditi mengalami penurunan pada bulan Februari 2021 dibandingkan dengan bulan Januari 2021 (tabel 2). Uraian Nilai CIF (juta US\$) Januari Februari mesin-mesin/pesawat mekanik 79.7 7.53 mesin/peralatan listrik 1.17 12.61 Pupuk 5.17 8.58 bahan kimia anorganik 1.9 5.33 lokomotif dan peralatan kereta api 3.78 2.99 bubur kayu/pulp 2.55 4.1 Besi dan Baja 1.58 0.98 Plastik dan barang dari plastik 0.8 1.53 Produk Keramik 0.72 1.23 Garam, belerang dan kapur 0.82 1.05 Jumlah 98.19 45.93 Lainnya 4.01 4.44 TOTAL 102.2 50.37 Berdasarkan tabel 2 tersebut, terlihat bahwa peningkatan nilai import nonmigas Sumatera Selatan di Kota Palembang selama triwulan I tahun 2021 lebih didominasi oleh komoditas mesin/peralatan listrik dengan nilai \$12,61 juta dan penurunan nilai import non migas terendah selama triwulan I 2021 ini terlihat pada mesin-mesin/pesawat mekanik dengan nilai \$7,53 juta pada bulan Februari 2021 dari \$79,7 juta bulan Januari 2021. Volume ekspor Sumatera Selatan

pada bulan Februari 2021 mengalami penurunan sebesar \$1.872,21 dibandingkan dengan dengan bulan Januari 2021 sebesar \$ 2.398,84, namun demikian berbanding terbalik dengan bulan Februari 2020 yang mengalami kenaikan dari \$1.812,87. Hal ini menunjukkan net ekspor luar negeri sejalan dengan pemulihan ekonomi global serta akselerasi konsumsi pemerintah di tengah penurunan komponen penyusun pertumbuhan ekonomi sisi permintaan lainnya. (BPS. 2021). Uraian Nilai CIF (juta US\$) Januari Februari Karet dan Barang dari karet 141,62 135,1 bubur kayu/pulp 109,11 93,25 Bahan Bakar Mineral 90,97 74,45 Lemak dan Minyak Hewan/Nabati 17,8 20,97 Kertas/Karton 7,25 6,06 Pupuk 4,44 7,68 Kayu, Barang dari Kayu 4,91 4,27 Ampas/Sisa Industri Makanan 1,54 3,45 Buah-buahan 1,75 2,9 Bahan Kimia Anorganik 1,55 2,91 Jumlah 380,94 351,04 Lainnya 6,2 3,71 TOTAL 387,14 354,75

Tabel 3 tersebut menjelaskan besarnya nilai ekspor nonmigas pada bulan Januari dan Februari 2021 adalah lebih dipengaruhi oleh ekspor karet dan barang dari karet walaupun nilainya semakin berkurang pada bulan Februari 2021 sebesar \$135,1. Peningkatan ekspor nonmigas pada semester 1 ini lebih didominasi oleh ekspor komoditas pupuk, ampas/sisa industri makanan, buah-buahan, serta bahan kimia anorganik. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang hingga tahun 2020 lebih didominasi oleh pengeluaran konsumsi pemerintah dengan angka tertinggi sebesar 16,53 persen pada tahun 2017. namun demikian seiring dengan perkembangan kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Palembang mengalami penurunan paling tinggi hingga mencapai -12,78 persen, walaupun secara keseluruhan pengeluaran konsumsi di Kota Palembang mengalami penurunan. Berdasarkan struktur pengeluaran dan penerimaan APBD Kota Palembang Tahun 2021, besaran jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang tahun 2021 ini, yang berdasarkan tabel 5 berikut bahwa jumlah pendapatan Kota Palembang ini adalah sebesar Rp. 4.173.128.552.559,-, total belanja daerah adalah sebesar Rp. 4.329.487.605.453,-, serta pembiayaan sebesar Rp. 156.359.052.894,- Pendapatan 4.173.128.552.559 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.555.350.777.559 a. Pajak Daerah 1.279.951.000.000 b. Retribusi Daerah 60.773.550.000 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 63.700.000.000 d. Lain-lain PAD yang sah 150.926.227.559 Pendapatan Transfer 2.173.015.965.000 a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.832.030.041.000 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 340.985.924.000 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 444.761.810.000 a. Pendapatan Hibah 287.585.000.000 b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 157.176.810.000 Belanja Daerah 4.329.487.605.453 Belanja Operasional 3.157.890.095.267 Belanja Pegawai 1.663.016.910.631 Belanja Barang dan Jasa 1.412.993.294.806 Belanja Subsidi 19.594.437.392 Belanja Hibah 59.305.202.438 Belanja Bantuan Sosial 2.980.250.000 Belanja Modal 1.043.984.219.242 a. Belanja Modal Tanah 81.236.415.125 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.035.159.751 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.356.205.723 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 677.394.144.343 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.962.294.300 Belanja Tidak Terduga 127.613.290.944 Pembiayaan Daerah (Netto) 156.359.052.894 Penerimaan Pembiayaan 156.359.052.894 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.359.052.894 Penerimaan Pinjaman Daerah 116.000.000.000 Pengeluaran Pembiayaan 0 Penyertaan Modal Daerah 0

Besarnya jumlah belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah lebih didominasi oleh belanja pegawai dan barang jasa. Jumlah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang menunjang pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Palembang tahun 2021. Berdasarkan sasaran inflasi 2019-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017, adalah sebesar 3,5%, 3,0% dan 3,0% dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Realisasi inflasi Sumatera Selatan di triwulan I, II dan III tahun 2020 dapat dinyatakan terkendali, yakni berada di dalam kisaran target inflasi nasional tahun 2020 yaitu sebesar $3 \pm 1\%$ (yoy). Penurunan tingkat inflasi di Kota Palembang secara

kumulatif (Gambar 3) pada tahun 2018 terus terjadi hingga bulan Februari tahun 2021 hingga mencapai 0,35 persen. Namun demikian, tidak terjadi pada bulan Maret 2021. Inflasi di kota Palembang pada akhir triwulan kesatu mengalami sedikit peningkatan sebesar 0.53 persen (ytd), 1,11 persen (yoy) dan 0,17 persen (mtm), hal ini dipengaruhi oleh kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia yang membuat mulainya aktifitas ekonomi di Kota Palembang menjelang berakhirnya lock down di beberapa daerah di Indonesia. 2. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting, Barang Lainnya dan Jasa Kota Palembang (Gambar 3) selama periode triwulan I tahun 2021 tercatat mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2021 yaitu sebesar 0,43 persen (mtm) dengan cabai merah sebagai komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada triwulan I tahun 2020. Pada triwulan kesatu ini, berdasarkan tabel perubahan harga rata-rata per bulan tahun 2021 (gambar 5), komoditas yang cenderung berfluktuasi selama triwulan kesatu ini yaitu daging ayam ras, bawang putih, minyak goreng, bawang merah dan cabai merah. Namun demikian, untuk komoditas yang selalu dominan mengalami inflasi selama triwulan kesatu tahun 2021 ini adalah minyak goreng. Bulan Inflasi Deflasi Komoditas Andil Komoditas Andil Januari 1 Cabai Merah 0.13 1 Telur Ayam Ras -0.08 2 Sewa Rumah 0.05 2 Bawang Merah -0.03 3 Daging Ayam 0.04 3 Angkutan udara -0.02 4 Cabai Rawit 0.04 4 Pepaya -0.01 5 Ikan Mujair 0.04 5 Beras -0.01 Februari 1 Sewa Rumah 0.07 1 Cabai Merah -0.08 2 Bawang Merah 0.02 2 Daging Ayam Ras -0.07 3 Tauge/kecambah 0.01 3 Telur Ayam Ras -0.03 4 Jagung Manis 0.01 4 Pisang -0.02 5 Cabai Merah 0.01 5 Emas Perhiasan -0.02 Maret 1 Bawang Merah 0.07 1 Emas Perhiasan -0.03 2 Sewa Rumah 0.07 2 Cabai Merah -0.1 3 Daging Ayam 0.06 3 Cabai Rawit -0.01 4 Bawang Putih 0.02 4 Ketimun -0.01 5 Mie Kering Instan 0.02 5 Cumi-cumi -0.01 Pada tabel 5 ini menggambarkan bahwa komoditas cabai merah memberikan andil inflasi tertinggi pada bulan Januari 2021 sebesar 0,13 persen, meskipun pada bulan februari 2021 sempat mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,08 persen. Komoditas yang turut memberikan andil terhadap deflasi tertinggi Kota Palembang Triwulan I tahun 2021 selain cabai merah adalah daging ayam ras sebesar -0,07 persen dan telur ayam ras, yaitu sebesar -0,08 persen. Fluktuasi harga bahan pangan selama triwulan I ini juga terjadi pada beras, bawang putih, gula pasir, papaya, emas perhiasan, jeruk. 3. Resiko ke Depan Atas Inflasi Daerah dan Perkembangan Harga Deflasi yang terjadi di Kota Palembang selama triwulan I akibat pandemic covid-19, telah membuat perubahan kebijakan fiskal menjadi kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga. Resiko ke depan suku bunga yang semakin menurun, menyebabkan bertambahnya pengalihan asset yang dimiliki masyarakat dan pengusaha, yang tentunya dapat mengubah potensi daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan permasalahan yang dihadapi Kota Palembang dalam melaksanakan pengendalian inflasi/deflasi pada triwulan I tahun 2020, diantaranya adalah: 1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Palembang karena daya beli masyarakat yang menurun 2. Meningkatnya resiko kasus covid-19 berpotensi menghambat laju pertumbuhan kelompok pengeluaran, baik pengeluaran masyarakat maupun pemerintah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan I ini, adapun kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang bersama beberapa Instansi di Kota Palembang, yang diantaranya adalah: 1. Rapat Koordinasi Tim Teknis Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Pulo Kemaro, sebagai upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi melalui kepariwisataan di Kota Palembang. Untuk pendanaan, dilakukan baik melalui dana APBD dan menyertakan dana

Tjsl/CSR dari BUMN/BUMD dan swasta. 2. Rapat Koordinasi Rekomendasi dan Harapan Dewan Perwakilan Asperindo Sumsel. Sebagai usaha Pemerintah Kota Palembang melalui Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia untuk meningkatkan daya beli dan pendistribusian barang ekonomi bagi masyarakat di Kota Palembang. 3. Audiensi dengan PT. Bank Mandiri tentang kerjasama dengan Pemkot Palembang “Cashless Ecosystem di tempat wisata dan perparkiran pasar”. Penerapan cashless payment merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah uang beredar serta potensi resiko peningkatan covid-19 di Kota Palembang. 4. Audiensi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Kota Palembang untuk pelaksanaan proyek KPBU Jalan Nasional. Hal ini dilakukan untuk rehabilitasi jalan nasional untuk memperlancar distribusi barang ke Kota Palembang 5. Audiensi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) tentang kerjasama pengawasan di bidang obat dan makanan serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang dan perangkat daerah terkait bersama Balai Besar Palembang Obat dan Makanan (BBPOM) bekerjasama melakukan sidak dan monitoring pasar bersama secara rutin, atas makanan tidak sehat di publik, yang mengandung boraks, formalin dan pengawet makanan. Diawali dengan peninjauan pasar Alang-Alang Lebar Palembang, Pasar Lemabang, Pasar Yada 6. Audiensi dengan pengembang Indonesia untuk kerjasama pembangunan rumah satu hektar satu kecamatan di Kota Palembang. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi deflasi yang terjadi pada bahan ekonomi non pangan di Kota Palembang 7. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Palembang, yaitu sebagai wadah koordinasi antar instansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di Kota Palembang, sehingga dapat mendukung perbaikan ekonomi regional di masa pandemi covid-19. 8. Sosialisasi kemudahan investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal ini pun dilakukan seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga secara global. 9. Audiensi dengan Pelindo terkait dengan pengembangan Sei Lais Palembang. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus distribusi barang dari dan ke Kota Palembang. 10. Peresmian jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung Ruas Kayu Agung – Palembang (Keramasan) oleh Presiden Republik Indonesia Peresmian jalan ini dilakukan sebagai upaya memperlancar pendistribusian barang dari dan ke Kota Palembang. 11. Pembebasan lahan Fly Over Angkatan 66 Sekip Ujung Palembang, sebagai upaya memperlancar pendistribusian barang dalam wilayah Kota Palembang 12. Mengikuti kick off meeting Indonesia Maju dalam rangka pemulihan ketahanan ekonomi di masa pandemi covid-19 melalui vidcon bersama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Politik Kemendagri RI Pemerintah Kota Palembang melalui perangkat dinas terkait turut serta mengkoordinasikan arahan pemerintah guna pemulihan ketahanan ekonomi di masa pandemi covid-19. 13. Penarikan undian “Super Grand Prize” Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel. Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah tabungan masyarakat pada perbankan. Hal ini ditujukan guna mengurangi jumlah uang beredar saat pemulihan ketahanan ekonomi di masa pandemi covid-19. 14. Rapat bulanan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palembang Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial Kota Palembang melakukan rapat bulanan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palembang sebagai upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembagian dana PKH ke wilayah-wilayah Kelurahan Kota Palembang. 15. Menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan terkait Program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan serta kunjungan ke Pasar Ikan Modern dan TPA di Kota Palembang. Pelaksanaan kunjungan ini diperlukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Kota Palembang terhadap tingkat konsumsi ikan dan pengelolaan sampah menjadi usaha masyarakat yang dapat menambah pendapatannya. 16. Penyebaran bibit ikan di Sungai Musi Palembang 17. Mandiri Investment Forum 2021: Reform after the storm, membahas

peluang dan tantangan investasi di Indonesia bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 18. Edukasi daring training of trainer Hari Gizi Nasional tahun 2021 dengan tema Keluarga Sehat dan Kuat melalui pemenuhan gizi seimbang melalui vidcon bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Palembang dan PKK Kecamatan se-Kota Palembang 19. Kunjungan ke UMKM (produk herbal) Ibu Jumiah 20. Audiensi dengan Bank Sumselbabel terkait dukungan layanan BSB untuk operasional Pemerintah Kota Palembang 21. Kunjungan ke Komunitas Industri yang mendapatkan bantuan Pemerintah Kota Palembang 22. Mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 dengan tema Memperkuat Sektor Pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi covid-19 oleh Presiden RI 23. Rapat koordinasi terkait Nota Kesepahaman Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wilayah Sumsel antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Kab/Kota 24. Narasumber terkait peluang usaha di masa pandemi dengan tema Membangun Pondasi Usaha UMKM 25. Rapat Tim Teknis TPID Provinsi Sumatera Selatan 26. Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitang ke Pemerintah Kota Palembang terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Belitang dan Pemerintah Kota Palembang bekerja sama untuk mendistribusikan barang ekonomi yang dimiliki untuk Kota Palembang. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. 27. Pembukaan kegiatan bazar dalam rangka hari jadi Asosiasi Kemitraan Usaha Mikro Indonesia (AKUMINDO) ke-5 Provinsi Sumsel tahun 2021 28. Audiensi dengan Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan (FSPSS) Kota Palembang terkait Kegiatan Pelatihan Manajemen bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 29. Audiensi dengan Komunitas Pedagang Pasar Sako Palembang 30. Rencana Kerjasama Pengelolaan Pasar Ikan Modern 31. Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang 32. Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kota Metro ke Pemerintah Kota Palembang terkait Kajian bidang perekonomian di masa pandemic, new normal di Kota Palembang, serta penataan parkir di Kota Palembang 33. Narasumber lanjutan pelatihan penyuluhan keamanan pangan siap saji bersama Organisasi Profesi Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang 34. Soft opening BoonBun & Milk (burger) 35. Peninjauan Pasar Tangga Buntung Palembang oleh Wakil Walikota Palembang 36. Sosialisasi QRIS Bank Sumsel Babel bekerjasama dengan UKM-IKM BPKAD Kota Palembang 37. Rapat Koordinasi Program Unggulan Kota Palembang pendukung TPID Award 2020 38. Kunjungan Wakil Walikota Palembang terkait pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Palembang 39. Pembukaan FGD Kick Off Program Keamanan Pangan Terpadu Kabupaten/Kota Pangan Aman melalui Video Conference (vidcon) via aplikasi zoom cloud meeting bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan 40. Rapat koordinasi dalam rangka pengawasan produk makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan produk illegal lainnya 41. FGD membahas kajian konsep Smart City menuju Penerapan ekonomi digital melalui Video Conference via aplikasi zoom cloud meeting bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 42. FGD perluasan implementasi QRIS antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel dan Sekretariat Daerah Kota Palembang 43. Grand Opening Rumah Loer Palembang (PT. Kopi Loer Jaya) 44. Grand Opening Intan Kerupuk Palembang 45. FGD Rencana Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Bank Indonesia melalui Vidcon aplikasi zoom cloud meeting 46. Penandatanganan perjanjian kerjasama program digitalisasi layanan PDAM Tirta Musi Palembang antara PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk dengan PDAM Tirta Musi Palembang 47. Pertemuan dengan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern/Swalayan terkait pemasaran produk UMKM (tas Belanja Plastik) 48. Sosialisasi kriteria evaluasi kinerja TPID tahun 2020 (award 2021) melalui video conference via aplikasi zoom cloud meeting

bersama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 49. Rapat FGD lanjutan pembahasan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Palembang 50. Fashion Show Sewet Karya Kriya Sriwijaya 2021 bersama Dekranasda dan TP PKK Provinsi Sumsel 51. Rakernas Dewan Kerajinan Nasional tahun 2021 melalui Vidcon via aplikasi zoom cloud meeting 52. Peninjauan lokasi TMMD dilanjutkan dengan pemberian sembako secara simbolis kepada masyarakat kampung Jawi dan penanaman pohon dalam rangka TMMD ke 110 TA 2021 Kodim 0418/Plg 53. Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Kemaro 54. Pembagian Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai salah satu program Kementerian Sosial RI, pembagian bantuan sosial beras di Kota Palembang, untuk keluarga penerima manfaat di 18 Kecamatan Kota Palembang, guna menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Terjadi keterlambatan penyerapan anggaran, salah satunya dikarenakan oleh adanya kebijakan physical distancing, selain itu terjadi perubahan pada sistem pencatatan keuangan yang semula SIMDA menjadi SIPD. b. Munculnya data warga miskin baru yang seharusnya menerima bantuan sosial PKH dan BPNT, hingga mencapai 49.669 Kepala Keluarga. Total warga miskin di Palembang mencapai 115.000 KK, namun demikian baru sekitar 65.000 KK yang terprogram untuk menerima bantuan sosial. c. Banyaknya Focus Group Discussion dan instruksi Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional mengarahkan pada tugas Pemerintah Kota Palembang, melalui TPID Kota Palembang untuk mendorong pembangunan pertanian dalam skala luas, salah satunya menghidupkan program food estate pada wilayah di Indonesia.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palembang adalah sebagai berikut: 1. Perlunya dikoordinasikan permasalahan pendataan warga yang mendapatkan bantuan sosial, berupa PKH dan lainnya 2. Memberikan kemudahan untuk distributor dan retail tetap melaksanakan kegiatan perdagangan dengan protokol kesehatan yang ketat, mengingat pandemi di Kota Palembang yang hamper mengarah ke Zona Merah. 3. Pembinaan yang intensif dari pemerintah kota untuk para kelompok tani, pengusaha industri UMKM dan Koperasi, serta nelayan. 4. Kebijakan operasi pasar murah untuk mengendalikan inflasi pada beberapa produk, khususnya menjelang HKBN di triwulan mendatang.